

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Di era perkembangan ekonomi saat ini memberitakan kepada kita tentang peristiwa-peristiwa mengenai adanya kecurangan-kecurangan (fraud) terhadap berbagai entitas organisasi dimana kebanyakan kecurangan tersebut dilakukan oleh pegawai dari entitas organisasi tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, perkembangan globalisasi dunia bisnis dapat memicu para pelaku bisnis dan ekonomi untuk melakukan berbagai tindakan agar bisnisnya tetap bertahan di dunis bisnis. Tindakan tersebut diantaranya adalah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Terjadinya tindakan ini berkaitan erat dengan tidak adanya komunikasi yang cukup dengan berbagai operasi yang ada, sehingga untuk menilai efektivitas kinerja menjadi titik kelemahan dalam perusahaan.

Baik profesi auditor internal dan eksternal juga sangat dituntut akan kemampuannya memberikan jasa yang terbaik dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh manajemen tertinggi dalam suatu organisasi. Peningkatan pengawasan atau pengendalian internal di dalam suatu organisasi tentunya menuntut tersedianya audit internal dan tata kelola perusahaan yang baik, agar terciptanya suatu proses pengawasan atau pengendalian internal yang baik pula. Masalah yang kemudian timbul yang berkaitan dengan peran pengendalian internal adalah seberapa besar keberadaan pengendalian internal dalam memberikan nilai tambah (*value added*) bagi perusahaan.

Menurut Rae dan Subramaniam (2008:106), menyatakan bahwa prosedur pengendalian internal yang jelek dipandang sebagai faktor dimana memungkinkan kecurangan untuk terjadi. Jika pengendalian internal suatu perusahaan lemah maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan fraud sangat besar. Sebaliknya, jika pengendalian internal kuat, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan fraud dapat diperkecil. Kalaupun kesalahan dan fraud masih terjadi, bisa diketahui dengan cepat dan dapat segera diambil tindakan-tindakan perbaikan sedini mungkin (Hermiyetti, 2011:3).

Maka demi kepentingan bersama, US SEC (*Securities and Exchange Commission*) berperan penting dengan mengeluarkan *Sarbanes-Oxley Act of 2002* yang mengatur *good corporate governance* perusahaan-perusahaan yang *go public* di Amerika Serikat untuk melindungi kepentingan para investor dari praktek-praktek bisnis yang tidak sehat oleh perusahaan publik. Terlihat dalam *Section 302 Sarbanes-Oxley Act* menyatakan bahwa direksi perusahaan harus bertanggung jawab secara pribadi terhadap pernyataan prosedur pengendalian, pengendalian internal, dan jaminan atas *fraud*. Sedangkan dalam *Section 404* tercantum ketentuan yang ketiga yaitu mewajibkan direksi perusahaan untuk menyatakan tanggung jawab manajemen dalam menghasilkan dan memelihara kecukupan bukti-bukti dari struktur pengendalian internal dan prosedur pengendalian internal dalam setiap pelaporan keuangan. Selain itu menurut buku *Auditing (Pemeriksaan Akuntan)* oleh Akuntan Publik, (Sukrisno, 2004: 344-346) telah meringkas pokok-pokok yang diatur dalam SOX yaitu bagian ketiga terhadap akuntan public, 3.1 Membentuk Publik *Company Accounting Oversight Board (PCAOB)* yang bertujuan untuk mengawasi audit atas perusahaan public dan melindungi kepentingan investor dan 3.3 Perputaran partner-

pemimpin (*lead*) atau *coordinating partner* audit atau *concurring reviewer* tidak dapat memberikan jasa audit kepada klien yang sama selama lebih dari lima tahun berturut-turut.

Dan bila suatu perusahaan dengan sistem pengendalian internal (SPI) yang benar dan kuat maka setidaknya penyimpangan-penyimpangan dapat diminimumkan (Astuti, 2010:2). Tujuan dibentuknya SPI adalah untuk menyediakan laporan yang lengkap, benar, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan (Firmansyah, 2010:82). Pengendalian intern yang baik dan disertai praktek-praktek yang sehat dalam tata kelola keuangan akan menjaga kekayaan perusahaan secara *preventif, detektif dan korektif*. Pengendalian internal yang baik, berpotensi mengurangi *audit fee* karena waktu (*audit hours*) yang digunakan untuk menyelesaikan audit menjadi lebih pendek (Herawati, 2011:8)

Menurut Kawedar (2010:2), peran sistem pengendalian internal adalah untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas. Dan hal-hal tersebut merupakan bagian dari implementasi *good corporate governance*. Menurut Astuti (2010:1), *good corporate governance* (GCG) bukan merupakan pola baru atau merupakan sebuah inovasi, tetapi merupakan suatu pertanggungjawaban kepada publik mengenai perkembangan yang ada. Konsep GCG ini mempunyai maksud tata kelola organisasi atau pemerintahan yang baik, ditinjau dari konsep tersebut maka GCG mencakup tidak hanya diterapkan pada sektor pemerintah saja tetapi juga pada sektor swasta, yang jelas tuntutan untuk transparan dan akuntabel diperlukan dalam konsep ini.

Konsep GCG sendiri merupakan upaya perbaikan terhadap sistem, proses, dan seperangkat peraturan dalam pengelolaan suatu organisasi yang pada esensinya mengatur dan memperjelas hubungan, wewenang, hak dan kewajiban semua pemangku kepentingan dalam arti luas dan khususnya organ RUPS, Dewan Komisaris, dan Dewan direksi dalam arti sempit. Namun harus disadari bahwa betapapun baiknya suatu sistem dan perangkat hukum yang ada, pada akhirnya yang menjadi penentu utama adalah kualitas dan tingkat kesadaran moral dan spiritual dari para actor/ pelaku bisnis itu sendiri (Sukrisno, 2013:107).

Menurut Arens (2008:377), komite audit merupakan sebuah komite yang ditunjuk oleh perusahaan(dewan komisaris) sebagai penghubung antara dewan dan audit eksternal, internal auditor serta anggota independen. Komite audit juga bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi berkelanjutan dengan auditor eksternal maupun internal, termasuk menyetujui jasa audit maupun nonaudit yang dilakukan oleh para auditor perusahaan publik, hal ini memungkinkan para auditor dan direktur membahas berbagai masalah yang mungkin berhubungan dengan hal-hal seperti integritas atau tindakan manajemen. Salah satu tujuan dari dibentuknya komite audit adalah merekomendasikan seleksi auditor eksternal untuk mengaudit perusahaan. Badan ini bertugas memilih dan menilai kinerja perusahaan kantor akuntan publik, dan dengan demikian komite audit tersebut harus melakukan kerjasama dengan internal auditor maupun eksternal auditor dalam menghasilkan laporan keuangan yang dapat mencerminkan kondisi *good governance*.

Dari sisi permintaan, kehadiran komite audit memiliki hubungan yang positif dengan *audit fee* karena komite audit memastikan bahwa lama proses audit tidak akan dikurangi sampai pada tingkat kualitas audit yang diinginkan. Dari sisi

penawaran, keterlibatan komite audit dalam memperkuat pengendalian internal yang menuntun auditor eksternal mengurangi penilaian dari risiko pengendalian, menghasilkan uji substantif yang lebih sedikit, dan *audit fee* yang lebih rendah (Stewart dan Kent, 2006:389).

Permasalahan mengenai penetapan *audit fee* yang diterima oleh kantor akuntan publik dari kliennya, masih menjadi pro dan kontra antara orang yang menginginkan aturan tentang *audit fee* dengan orang yang menolak adanya aturan tentang *audit fee*. Pendukung gagasan ini pada umumnya beranggapan bahwa dengan adanya aturan *audit fee* maka persaingan antara kantor akuntan publik dapat dikurangi sedangkan yang menolak beranggapan bahwa kantor akuntan publik memiliki efisiensi yang bervariasi. Akuntan yang menjalankan kantornya dengan efisiensi tinggi maka wajar apabila memiliki tingkat persaingan yang tinggi pula. Bukan hanya mengenai permasalahan *audit fee* saja, tetapi juga permasalahan mengenai pengimplementasian *good corporate governance* yang masih belum begitu baik, sehingga belum bisa meminimalisasi kecurangan yang ada.

Oleh karena itu, dalam upaya mewujudkan pengendalian internal dan *Good Corporate Governance (GCG)* yang baik, perusahaan memerlukan peran auditor eksternal yang bertugas meneliti dan mengevaluasi suatu sistem akuntansi serta menilai laporan keuangan yang telah diberikan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh akan pengendalian internal dan implementasi *good corporate governance* yang seringkali mempengaruhi *audit fee* yang diberikan oleh klien kepada kantor akuntan publik, Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengendalian**

Internal dan *Good Corporate Governance* terhadap *Audit Fee* (KAP di Bandung)”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang penelitian, maka secara spesifik rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara pengendalian internal terhadap *audit fee*?
2. Apakah terdapat pengaruh antara *good corporate governance* terhadap *audit fee*?
3. Apakah terdapat pengaruh antara pengendalian internal dan *good corporate governance* secara simultan terhadap *audit fee*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menemukan hal-hal tentang:

1. Pengaruh positif atau tidaknya antara pengendalian internal terhadap *audit fee*?
2. Pengaruh positif atau tidaknya antara *good corporate governance* terhadap *audit fee*?
3. Pengaruh positif atau tidaknya antara pengendalian internal dan *good corporate governance* secara simultan terhadap *audit fee*?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti penting dengan harapan dapat memberikan kegunaan dalam menjawab permasalahan yang ada. Disamping itu diharapkan mempunyai kegunaan teoritis untuk mengembangkan ilmu lebih lanjut maupun kegunaan praktis menyangkut pemecahan-pemecahan permasalahan yang aktual. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Penelitian ini memberikan informasi dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama penelitian yang berkaitan pengendalian internal dan *good corporate governance* terutama mengenai *audit fee*.
2. Bagi peneliti, dapat digunakan untuk membandingkan teori akuntansi yang didapat dibangku kuliah dengan yang terjadi dilapangan. Dan juga sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah referensi mengenai auditing, terutama tentang kinerja audit yang berpengaruh terhadap *audit fee* sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti di masa yang akan datang.
3. Peneliti berikutnya, Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian mendatang mengenai pengaruh pengendalian internal dan *good corporate governance* terhadap *audit fee*.